

KETERTIBAN UMUM

2009

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.2, LD.2009/NO.2 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sanggau yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana Kabupaten Sanggau beserta kelengkapannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1950, UU No.8 Thn 1981, UU No.23 Thn 1997, UU No.34 Thn 2000, UU No.22 Thn 2003, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.38 Thn 2004, PP No.27 Thn 1983, PP No.6 Thn 1988, PP No.65 Thn 2001, PP No.66 Thn 2001, PP No.32 Thn 2004, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.4 Thn 1997, Kep Menhub No.KM84 Thn 1999, Kepmendagri No.23 Thn 2001, Perda Kab. Sanggau No.1 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.2 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.5 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.6 Thn 1998, Perda Kab. Sanggau No.10 Thn 1999, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 2000, Perda Kab. Sanggau No.5 Thn 2000, Perda Kab. Sanggau No.16 Thn 2000, Perda Kab. Sanggau No.2 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.7 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.8 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.10 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.21 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.23 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Pengawasan Penyelenggara Pembinaan Ketertiban, Tertib Kebersihan, Tertib Bangunan dan Usaha, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai, Parit dan Saluran, Tertib Sarana Komunikasi, Tertib Parkir dan Angkutan Jalan Raya, Tertib Usaha Tertentu, Tertib Sosial.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009
 - Penjelasan 9 hlm

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.3, LD.2009/NO.3 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disesuaikan jumlah desa dengan kebutuhan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.8 Thn 1974, UU No.12 Thn 2003, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.20 Thn 2001, PP No.72 Thn 2005, PP No.73 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.3 Thn 2005, Permendagri No.28 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009
 - Penjelasan 3 hlm

PENETAPAN DESA TAPANG DULANG

2009

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.4, LD.2009/NO.4 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PENETAPAN DESA TAPANG DULANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan ditata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.20 Thn 2001, PP No.72 Thn 2005, , PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.3 Thn 2005, Permendagri No.28 Thn 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Batas Wilayah, Pusat Pemerintahan, Kewenangan Desa.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009
 - Penjelasan 1 hlm

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.5, LD.2009/NO.5 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.58 Thn 2005, PP No.72 Thn 2005, PP No.79 Thn 2005, Permendagri No.15 Thn 2006, Permendagri No.16 Thn 2006, Permendagri No.17 Thn 2006, Permendagri No.53 Thn 2007, Permendagri No.29 Thn 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyusunan Rancangan dan Peraturan Desa, Materi Muatan, Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, Teknik Penyusunan, Evaluasi, Penyebarluasan Peraturan Desa, Pembinaan dan Pengawasan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009
 - Penjelasan 3 hlm

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

2009

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.6, LD.2009/NO.6 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.25 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.72 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.5 Thn 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Mekanisme, Para Peserta dan Narasumber,
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009
 - Penjelasan 2 hlm